

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Akbar Nasution, Faisal, 2003, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintah Daerah*,
Pustaka

Bangsa Press, Medan,.

Ashshofa, Burhan, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,.

Bagus Supancana Rahmadi, Ida, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi
Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.

Elliot Goodman, Jordan dan John, 1994, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*,
alih bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo,
Jakarta,.

Erawaty, A.F Elly dan J.S Badudu, 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia
Inggris, edisi pendahuluan*, ELIPS, Jakarta,

Hadjon, Philipus M., 1991. *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum,
Universitas Airlangga, Surabaya,

HR, Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Indonesia, Jakarta,

Ilmar, Aminuddin, 2005. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana,
Jakarta,

J. Rachbini, Didik, 2008. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Macanan Jaya
Cemerlang, Jakarta,

Johan Nasution, Bahder, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,
Bandung,

- Moezahar Thaib, Tiny dan Sudaryanto, 2012. *Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, Fasilitas Non Fiskal Penanaman Modal Pusdiklat BKPM*, Jakarta,
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,
- Retno Wahyuningsih, Sri dan Firadus Abdullah, 2012. *Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, Fasilitas Fiskal Penanaman Modal Pusdiklat BKPM*, Jakarta,
- Rokhmatussa, Ana Dan Suratman, 2009. *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Salim Dan Budi Sutrisno, 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Salim, Agus Andi Gadjong, 2007. *Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia*, Bogor,
- Sembiring, Sentosa, 1999. *Hukum Investasi*, Nuasa Aulia, Bandung,
- Simarmata, Rikardo, *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Yayasan Kemala Jakarta.
- Soegono, Bambang, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 195, Sebagaimana Dikutip Dari Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Supranto, J., Metode 2003. *Penelitian dan Hukum statistik*, Rineka Cipta, Jakarta,

Syahrin, Alvi, 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan,

Utrecht, E., 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Padjadjaran, Bandung,

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non perizinan Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

C. Internet

Boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat

<http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/berita/57-opinion/139>
penyelenggaraanurusan-penanaman-modal-berdasarkan-uu-no-23-tahun
2014

<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/37-kerjasama-pemda-dan-investor>
dalam-memajukan-perekonomian-daerah

<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/37-kerjasama-pemda-dan-investor>
dalam-memajukan-perekonomian-daerah

<http://perumnas.co.id/good-corporate-governance/>

[http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2,](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-wewenang>
danpembahasannya.html,

<https://fardiansyah7fold.wordpress.com/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi/>

puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1957.pdf

repository.uin-suska.ac.id/1616/4/BAB%20III.pdf

D. Tesis, Disertasi

Nasrianti, Kewenangan Pemerian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.